

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peranan**

##### **1. Pengertian Peranan**

Peranan adalah sebuah aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.<sup>1</sup> Peranan dapat dipahami sebagai sebuah harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Peranan juga merupakan sebuah penilaian akan sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Seorang antropolog bernama Linton (1936) menggambarkan teori peran ini sebagai interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntut individu untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Sedangkan Sarbin dan Allen menyebutkan bahwa ada tiga ukuran berlakunya sebuah peran yakni: jumlah peran, upaya yang dikeluarkan untuk peran tertentu, dan waktu yang dihabiskan dalam satu peran dibandingkan dengan peran lainnya. Dalam hal ini mereka berpendapat bahwa semakin

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 2002), 243.

<sup>2</sup>Gartiria Hutami dan Anis Chariri, "Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)" (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011), <http://eprints.undip.ac.id/30903/>.

banyak peran individu dalam repertoarnya<sup>3</sup> semakin siap dia untuk memenuhi tuntutan kehidupan sosial. Pemberlakuan sejumlah besar peran lebih menguntungkan, karena secara khusus pengambil peran dengan banyak peran dalam set perannya memiliki peluang yang lebih baik daripada pengambil peran dengan jumlah sedikit dalam hal bertahan pada situasi kritis.<sup>4</sup>

Merujuk pada beberapa definisi serta pemahaman diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa peranan adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdiri dari status atau keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya atau posisinya dalam suatu kelompok. Jika ditinjau dari sudut organisasi atau kelembagaan maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu kegiatan yang didalamnya mencakup hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang memiliki suatu posisi dalam suatu organisasi atau lembaga.

## **2. Peran Perpustakaan Sekolah**

Perpustakaan memiliki peran yang tidak dapat dipungkiri yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pembangunan pendidikan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu aspek terselenggaranya kegiatan sekolah. Perpustakaan sekolah juga memiliki andil serta peran yang besar terciptanya sebuah aktivitas sekolah yang baik. Hal ini setidaknya menjadi

---

<sup>3</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, repertoar diartikan sebagai daftar rencana permainan sandiwara atau peran yang sudah dipersiapkan dan dipelajari

<sup>4</sup>Cameron Thies, "Role Theory and Foreign Policy," 1 April 2009, [https://www.researchgate.net/publication/228985348\\_Role\\_Theory\\_and\\_Foreign\\_Policy](https://www.researchgate.net/publication/228985348_Role_Theory_and_Foreign_Policy).

perhatian agar peranan pendidikan perpustakaan dapat terus terselenggara.

Berikut adalah peranan yang dijalankan oleh perpustakaan:

- a. Pusat kegiatan belajar-mengajar untuk pendidikan seperti tercantum dalam kurikulum sekolah. Para siswa dapat memperdalam materi pembelajaran dengan memanfaatkan buku-buku atau sumber informasi lainnya yang disediakan di perpustakaan sebagai pengayaan atas informasi yang diterimanya di kelas.
- b. Pusat penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. Dengan beragamnya jenis dan bentuk informasi yang disediakan di perpustakaan para siswa dapat mengeksplorasi rasa ingin tahunya sehingga memupuk kecerdasan dan analisis dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya.
- c. Pusat membaca buku-buku yang bersifat rekreatif dan mengisi waktu luang (buku-buku) hiburan. Perpustakaan dapat dijadikan tempat wisata ilmu pengetahuan yang mengasyikan. Koleksi yang disediakan tidak hanya koleksi ilmiah tetapi beragam koleksi yang bersifat menghibur, apalagi dengan dikembangkannya koleksi multimedia.
- d. Pusat Belajar Mandiri bagi siswa. Perpustakaan menyediakan layanan bimbingan literasi informasi bagi siswa tentang bagaimana mengeksplorasi sumber daya informasi dengan efektif dan efisien. Pembimbingan tersebut memungkinkan para siswa menjadi pembelajar yang mandiri.

Dengan demikian, perpustakaan sekolah memiliki peran dan fungsi yang tidak bisa dianggap enteng begitu saja. Namun, peran itu akan berjalan dengan lancar apabila perpustakaan dikelola dengan sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

Peranan perpustakaan sekolah sangatlah mulia, hendaknya diwujudkan oleh pihak-pihak terkait yang ada di lingkungan sekolah. Pengelola haruslah melakukan pengelolaan secara optimal agar dapat dengan mudah dan nyaman digunakan oleh pengguna perpustakaan (pemustaka) dan juga pemustaka hendaknya memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh perpustakaan

---

<sup>5</sup>Komaruddin, "Rencana Strategis Perpustakaan Sekolah: Pendekatan Praktis," *Pusakaloka* 4, no. 1 (2012), <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/pustakaloka/article/view/834/641>.

sehingga peranan perpustakaan diatas dapat benar-benar terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

## **B. Kemitraan**

### **1. Pengertian Kemitraan**

Kemitraan sesungguhnya merupakan sebuah kebutuhan bagi para pihak dengan kesamaan orientasi yang ingin menghemat energi dan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda. Menurut Ambar Teguh Sulistiyani kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berakar dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh, sekutu, kompanyon, sedangkan *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian.<sup>6</sup> Sehingga pemahaman akan kata kemitraan ini mengacu pada kegiatan saling membantu dalam upaya menggapai sebuah tujuan.

Kemitraan merupakan sebuah kegiatan yang dianggap sebagai sebuah cara agar mendapatkan keinginan lebih mudah. Dalam dunia pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sedikitnya disebutkan bahwa sekolah/madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan, setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan,

---

<sup>6</sup>Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), 129.

serta dalam sistem kerjasama sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan harus melaksanakan kegiatan kemitraan guna meningkatkan serta memberdayakan semua unsur golongan yang ada di lingkungan sekolah.

Sebagai lembaga pelayanan yang beorientasi pada pengguna, perpustakaan perlu selalu berupaya untuk dapat memberikan layanan yang terbaik, agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna masing-masing. Dengan mengadakan kemitraan, bukan saja perpustakaan dapat memberikan kesempatan lebih luas untuk tidak saja dapat mempunyai akses ke sumber informasi yang dimiliki oleh perpustakaan sendiri tetapi juga ke perpustakaan lain. Sebagai lembaga yang turut bertanggung jawab pada penyabaran informasi dan ilmu pengetahuan, melalui kemitraan perpustakaan dapat berperan serta dalam mendorong dimanfaatkannya secara maksimal koleksi pustaka yang telah dihimpun.<sup>8</sup>

## **2. Unsur dan Prinsip Kemitraan**

Dalam pelaksanaan kemitraan, harus dipahami unsur-unsur pentingnya. Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Bambang Sudibyo, "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007," 2007, 18.

<sup>8</sup>Purwono, *Kerja Sama dan Jaringan Perpustakaan*, 1.4.

<sup>9</sup>Rahmatullah, "Modul Kemitraan Pemerintah dengan Perusahaan dalam Mengelola CSR: Studi Kasus di Kota Cilegon," *Informasi* 17, no. 1 (2012), <https://media.neliti.com/media/publications/52821-ID-model-kemitraan-pemerintah-dengan-perusa.pdf>.

- a. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.
- b. Transparansi. Hal ini diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antara mitra kerja. Meliputi transparansi pengolahan informasi dan transparansi pengelolaan.
- c. Saling menguntungkan. Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip-prinsip kemitraan secara lebih rinci dituangkan oleh Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan dalam “Kemitraan Sekolah dengan Pihak Eksternal” disebutkan bahwa dalam pelaksanaan program ini hendaknya menganut azas-azas sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Partisipasi/*Participation*: semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-hal yang menyangkut nasibnya serta bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah disepakati bersama;
- c. Percaya/*Trust*: saling mempercayai dan dapat dipercaya untuk membina kerjasama. Di sini transparansi menjadi tuntutan dan tidak bisa ditawar;
- d. Akseptasi/*Acceptable*: saling menerima dengan apa adanya dalam kesetaraan. Masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri;
- e. Komunikasi/*Communication*: masing-masing pihak harus mau dan mampu mengkomunikasikan dirinya serta rencana kerjanya sehingga dapat dikoordinasikan dan disinergikan;
- f. *Partnership*: tidak merendahkan satu dengan yang lain, tetapi sama-sama bersinergi untuk meningkatkan mutu sekolah;

g. Berdasarkan kesepakatan.<sup>10</sup>

Dari unsur serta prinsip di atas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kemitraan, hendaknya dipahami bahwasanya kemitraan bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan sembarangan. Maksudnya, kemitraan yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan bersama haruslah memperhatikan aspek-aspek penting seperti yang telah disebutkan di atas guna menciptakan sebuah kemitraan yang maksimal.

### **3. Bentuk/Pola Kemitraan**

Kemitraan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan guna untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas suatu bidang sehingga memperoleh hasil yang baik. Kegiatan kemitraan ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan pola, yakni sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### **a. Kemitraan Formal**

Kemitraan formal adalah bentuk kerjasama yang didasarkan pada satu kesepakatan atau perjanjian yang sifatnya mengikat dan dituangkan dalam dokumen naskah bersama. Kemitraan formal ini biasanya dilakukan oleh dua pihak atau lebih antar instansi, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan lain sebagainya. Contoh kemitraan formal ini adalah kerjasama antar lembaga (bilateral) seperti Indonesia-Australia, Indonesia-Jepang, kerjasama dengan SEAMOLEC, dan lain-lain.

#### **b. Kemitraan Informal**

---

<sup>10</sup>Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, *Kemitraan Sekolah dengan Pihak Eksternal* (Jakarta: Kementriam Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), 9–10.

<sup>11</sup>Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, 10–14.

Kemitraan informal adalah kemitraan yang didasarkan kesepakatan yang tidak mengikat dan tidak dituangkan dalam dokumen naskah kerjasama, tetapi lebih merupakan sebagai wujud adanya *cooperative*, kebersamaan dan saling menghargai dan menghormati keberadaan dari lembaga masing-masing.

**c. Kemitraan Formal dan Informal**

Kemitraan dengan masyarakat dapat digolongkan ke dalam kemitraan informal maupun formal, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, masyarakat berhak menuntut pendidikan yang baik dan bermutu. Tetapi pada saat yang sama masyarakat juga berkewajiban berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dengan menyumbangkan dana, daya, pikiran, tenaga, dan bentuk– bentuk lain bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

**d. Kemitraan Formal Bilateral atau Multi Lateral**

Sesuai dengan tuntutan otonomi daerah, kemitraan yang berkaitan dengan formal bilateral atau multi lateral dalam hal bantuan finansial (bantuan yang harus dikembalikan), perlu mempertimbangkan aspek kewenangan pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain bentuk kemitraan di atas, menurut Wibisono yang dikutip oleh Rahmatullah dalam artikelnyamenyatakan bahwa kemitraan yang dilakukan

antara perusahaan (instansi) dengan pemerintah maupun komunitas/masyarakat dapat mengarah pada tiga pola berikut, diantaranya:<sup>12</sup>

**a. Pola Kemitraan Kontra Produktif**

Pola ini akan terjadi jika sebuah instansi masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* yaitu mengejar profit sebesar-besarnya.

**b. Pola Kemitraan Semi Produktif**

Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan/instansi.

**c. Pola Kemitraan Produktif**

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. instansi yang melakukan kemitraan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada instansi.

**4. Indikator Kemitraan**

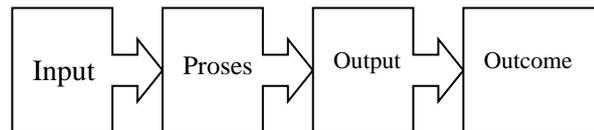
Untuk mengetahui keberhasilan sebuah kegiatan kemitraan, dibutuhkan sebuah indikator yang dapat diukur yang dijadikan sebagai pedoman untuk

---

<sup>12</sup>Rahmatullah, “Modul Kemitraan Pemerintah dengan Perusahaan dalam Mengelola CSR: Studi Kasus di Kota Cilegon.”

menentukan berperan atau tidaknya kemitraan yang dijalankan di dalam program kerja yang bersangkutan.

Menurut DitjenP2L & PM dalam Kuswidanti indikator-indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:<sup>13</sup>



Gambar 1. Indikator Keberhasilan Kemitraan

a. Indikator Input

Tolak ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator, yaitu:

- 1) Terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan.
- 2) Adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukan bagi pengembangan kemitraan.
- 3) Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait.

Hasil evaluasi terhadap input dinilai berhasil apabila ketiga tolak ukur tersebut dipenuhi.

b. Indikator Proses

Tolak ukur keberhasilan proses dapat diukur dari indikator sebagai frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi terhadap proses nilai berhasil, apabila tolak ukur tersebut terbukti adanya yang dilengkapi dengan agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan.

c. Indikator Output

Tolak ukur keberhasilan output dapat diukur dari indikator sebagai berikut: jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing institusi. Hasil evaluasi terhadap *output* dinilai berhasil, apabila tolak ukur tersebut diatas terbukti ada.

d. Indikator Outcome

---

<sup>13</sup>Kuswidanti, "Gambaran Kemitraan Lintas Sektor dan Organisasi di Bidang Kesehatan dalam Upaya Penanganan Flu Burung di Bidang Komunikasi Komite Nasional Flu Burung dan Pandemi Influenza" (Skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2008), lib.ui.ac.id/file?file=digital/122823-S-5461-Gambaran%20kemitraan-Halaman%20awal.pdf. (Skripsi, Universitas Indonesia, 2008).

Tolok ukur keberhasilan outcome adalah menurunnya angka permasalahan yang terjadi.

### C. Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan menurut UU No.43 Tahun 2007 pasal 1 didefinisikan sebagai sebuah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.<sup>14</sup>

Perpustakaan juga merupakan sebuah perluasan dari kata pustaka yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebutkan bahwa pustaka berarti kitab atau buku. Wiji Suwarno dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan mengutip ungkapan Sulistyio-Basuki mengenai pengertian perpustakaan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *library*. Istilah ini berasal dari kata *liber* atau *libri* yang berarti buku. Dalam bahasa asing lainnya perpustakaan disebut *bibliotheca* (Belanda), yang juga berasal dari bahasa Yunani *biblia* yang artinya tentang buku dan juga kitab<sup>15</sup>.

Kedua pengertian diatas menggambarkan bahwa perpustakaan adalah sebuah sarana yang menjadi pusat pengelolaan serta penyimpanan buku atau karya terbitan lainnya yang difungsikan guna memenuhi kebutuhan pengguna dalam hal pencarian informasi, pendidikan, pelestarian, atau dalam kegiatan rekreasi dan masih banyak lagi yang lainnya.

Fungsi perpustakaan seperti yang telah disebutkan di atas ditujukan kepada masyarakat pengguna perpustakaan (pemustaka), yang apabila dilihat dari

---

<sup>14</sup>Indonesia, *UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*.

<sup>15</sup>Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 10.

jenisnya maka perpustakaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yakni: perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi<sup>16</sup>

Namun, jenis perpustakaan di atas tidaklah mutlak. Ada ahli yang menambahkan atau bahkan mengurangi jumlah jenis perpustakaan ini, perpustakaan-perpustakaan tersebut dibagi berdasarkan jenis masyarakat pemustaka yang dilayani yang tentunya berbeda-beda serta menyediakan koleksi-koleksi serta layanan yang sesuai dengan pemustaka yang dilayaninya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian pada salah satu jenis perpustakaan yakni perpustakaan sekolah dikarenakan objek pada penelitian ini adalah perpustakaan SMA Plus Negeri 17 Palembang yang berada di lingkungan sekolah yakni sekolah menengah atas (SMA).

## **1. Pengertian Perpustakaan Sekolah**

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dasar hingga menengah. Perpustakaan sekolah jumlahnya sangatlah banyak, karena di tiap sekolah pasti terdapat perpustakaan baik ditingkat taman kanak-kanak, SD, SLTP, dan SMU/K. Semuanya memiliki perpustakaanya masing-masing.

Secara lebih rinci, perpustakaan sekolah dapat diartikan sebagai perpustakaan yang ada di lingkungan sekolah. Diadakannya perpustakaan sekolah adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat di lingkungan sekolah yang bersangkutan, khususnya para guru dan murid.

---

<sup>16</sup>Sulistyo-Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, 2.4.

Perpustakaan berperan sebagai media dan sarana yang menunjang kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) di tingkat sekolah.<sup>17</sup>

Hal ini senada dengan anggapan Sulisty-Basuki yang menyatakan bahwa perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang berada di lingkungan pendidikan formal pada cakupan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah tersebut dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang menyediakan berbagai macam informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, digunakan juga sebagai sumber belajar, serta memberikan pelayanan di lingkungan sekolah guna memenuhi kebutuhan pemustaka yakni para siswa, guru, serta staf di sekolah yang bersangkutan.

## **2. Tujuan Perpustakaan Sekolah**

Perpustakaan sekolah sebagai sebuah sarana yang dikelola oleh sekolah merupakan bagian integral dari keberlangsungan kegiatan sekolah yang bersangkutan dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.<sup>19</sup>Tujuan perpustakaan sekolah adalah menunjang proses pendidikan yang ada di sekolah dapat berlangsung secara baik dan lancar serta berhasil dalam

---

<sup>17</sup>Yusuf dan Suhendar, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*, 2.

<sup>18</sup>Sulistyo-Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, 2.16.

<sup>19</sup>Sulistyo-Basuki, 2.16.

mencapai tujuan pendidikan pada umumnya.<sup>20</sup> Lebih lanjut Sulisty-Basuki juga menjelaskan bahwa perpustakaan sekolah yang memiliki kedudukan sebagai bagian integral sekolah ini memiliki tujuan:

- a. Membantu dan memperkuat tujuan pendidikan sebagaimana digariskan dalam misi dan kurikulum sekolah;
- b. Mengembangkan dan memperkuat kebiasaan dan kegemaran membaca dan belajar pada murid serta penggunaan perpustakaan sepanjang hayat;
- c. Memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dalam menciptakan dan menggunakan informasi untuk pengetahuan, pemahaman, imajinasi, dan keceriaan;
- d. Membantu murid dalam pembelajaran dan keterampilan menilai serta menggunakan informasi, dengan tidak memandang bentuk, format atau media, termasuk kepekaan pada modus komunikasi dengan komunitas;
- e. Menyediakan akses ke sumber informasi lokal, regional, nasional dan global serta kesempatan yang mengekspos murid pada gagasan pengalaman, dan opini yang beraneka ragam;
- f. Mengorganisasikan aktivitas yang mendorong kesadaran dan kepekaan kultural dan sosial;
- g. Bekerjasama dengan murid, guru, pimpinan sekolah serta orang tua untuk menciptakan misi sekolah;
- h. Memaklumkan konsep bahwa kebebasan intelektual dan akses ke informasi merupakan hal penting bagi terbentuknya warga negara yang bertanggung jawab dan partisipasi dalam alam demokrasi, mempromosikan kebiasaan membaca, sumber serta jasa perpustakaan sekolah kepada seluruh komunitas sekolah dan komunitas di luar sekolah.<sup>21</sup>

### **3. Manfaat Perpustakaan Sekolah**

Perpustakaan sekolah pada hakikatnya bertugas sebagai pusat informasi yang mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Keberadaan perpustakaan sekolah memiliki manfaat yang sangat besar bagi instansi penyelenggaranya baik di tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah

---

<sup>20</sup>Dini Suhardini, "Peranan Manajemen Perpustakaan Sekolah dalam Mendukung Tujuan Sekolah," *EduLib* 1, no. 1 (2011), [https://www.researchgate.net/publication/313735365\\_PERANAN\\_MANAJEMEN\\_PERPUSTAKAAN\\_SEKOLAH\\_DALAM\\_MENDUKUNG\\_TUJUAN\\_SEKOLAH](https://www.researchgate.net/publication/313735365_PERANAN_MANAJEMEN_PERPUSTAKAAN_SEKOLAH_DALAM_MENDUKUNG_TUJUAN_SEKOLAH).

<sup>21</sup>Sulisty-Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, 2.16-2.17.

menengah sekalipun. Adapun manfaat dari penyelenggaraan perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca;
- b. Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-murid;
- c. Perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri;
- d. Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca;
- e. Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa;
- f. Perpustakaan sekolah dapat melatih melatih murid-murid ke arah tanggung jawab;
- g. Perpustakaan sekolah dapat membantu murid-murid, guru-guru, dan anggota staf sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>22</sup>

#### **4. Fungsi Perpustakaan Sekolah**

Perpustakaan sekolah yang merupakan salah satu bagian integral yang harus dimiliki oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki banyak fungsi yang dapat menunjang proses pendidikan di sekolah. Perpustakaan sekolah memiliki beberapa fungsi yang secara garis besar adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Fungsi Edukatif

Fungsi edukatif secara keseluruhan maksudnya adalah segala fasilitas dan sarana yang ada pada perpustakaan sekolah, terutama koleksi-koleksi yang dikelola oleh perpustakaan dapat membantu para pemustaka (siswa) untuk belajar dan memperoleh kemampuan dasar

---

14. <sup>22</sup>Lasa HS, *Manajemen Perpustakaan Sekolah* (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009),

<sup>23</sup>Yusuf dan Suhendar, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*, 4–6.

dalam mentransfer konsep-konsep pengetahuan, sehingga dikemudian hari siswa mampu untuk mengembangkan dirinya lebih baik lagi.

b. Fungsi Informatif

Fungsi informatif berkaitan dengan mengupayakan penyediaan koleksi yang bersifat “memberi tahu” mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan para siswa dan guru.

c. Fungsi Rekreasi

Fungsi rekreatif yang diemban oleh perpustakaan sekolah tidak hanya berarti secara fisik perpustakaan menyediakan tempat-tempat yang dapat memanjakan mata sehingga timbul rasa ingin mengunjungi perpustakaan, namun lebih kepada sisi psikologisnya. selain dari pada itu, fungsi rekreatif perpustakaan sekolah dapat diartikan sebagai wadah untuk mengisi waktu luang siswa dengan membaca berbagai jenis koleksi perpustakaan atau memanfaatkan layanan yang di perpustakaan.

d. Fungsi Riset atau Penelitian

Fungsi riset atau penelitian ini maksudnya adalah dalam hal koleksi perpustakaan sekolah bisa dijadikan bahan untuk membantu dilakukannya kegiatan penelitian sederhana. Segala jenis informasi tentang pendidikan setingkat sekolah yang bersangkutan sebaiknya disimpan di perpustakaan ini sehingga dengan demikian, para siswa mampu memanfaatkannya jika ingin mengetahui tentang informasi tertentu terkhusus pada kegiatan riset.

Berdasarkan pada uraian mengenai fungsi perpustakaan di atas, dapat diketahui bahwa perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pengemas/pengelola buku semata. Namun lebih dari itu, perpustakaan juga berfungsi sebagai sarana pengembang pengetahuan, kreatifitas, pembentukan karakter, pelestarian, serta sebagai sarana hiburan bagi siswa.

## **5. Tanaga Pengelola Perpustakaan Sekolah**

Salah satu faktor terpenting dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah adalah sumber daya manusia pengelola perpustakaan itu sendiri. Sumber daya manusia pengelola perpustakaan sekolah biasanya adalah guru atau pegawai yang diberi tugas berdasarkan surat tugas atau surat keputusan kepala sekolah untuk melaksanakan tugasnya di perpustakaan.

Namun, sumber daya manusia pengelola perpustakaan sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan/atau bidang lain yang disertai dengan pernah melaksanakan atau ikut serta dalam diklat penyetaraan di bidang perpustakaan. Karena, perpustakaan sekolah sebagai unit kerja perlu dikelola dengan sistem manajemen yang baik (profesional) dan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan sekolah yang memiliki kemampuan dan berwawasan luas agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemustakanya.

Ibrahim Bafadal juga menjelaskan bahwa pada dasarnya petugas perpustakaan sekolah terbagi atas beberapa jenis, yaitu seseorang yang bertindak sebagai kepala perpustakaan sekolah yang sering disebut juga

dengan kata pustakawan, guru pustakawan, dan beberapa anggota staf perpustakaan.<sup>24</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga pengelola perpustakaan hendaknya dibagi atas tiga kategori berikut ini:

- a) Pustakawan (*Librarians*), yakni mereka yang bekerja di perpustakaan secara penuh (*full time*) serta memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal ilmu perpustakaan atau pelatihan kepustakawanan serta memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.<sup>25</sup>
- b) Guru Pustakawan (*Teacher Librarians*), yakni guru yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan bidang perpustakaan idealnya 30 SKS. Guru pustakawan ini tidak hanya bekerja secara penuh di perpustakaan namun juga menjalankan tugasnya sebagai guru di sekolah.<sup>26</sup>
- c) Staf Perpustakaan (*Library Staff*), yakni pegawai administrasi yang ditugaskan untuk mengelola perpustakaan serta membantu pustakawan dalam melaksanakan tugasnya di perpustakaan.

#### **D. Pelestarian Koleksi Budaya**

---

<sup>24</sup>Ibrahim Bafadal, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 176.

<sup>25</sup>Indonesia, *UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*.

<sup>26</sup>HS, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, 40.

Pelestarian menjadi bidang yang kompleks yang mencakup beragam permasalahan yang timbul, baik dari konteks budaya, sosial, ekonomi, lembaga warisan budaya, maupun pemakainya. Istilah pelestarian koleksi sangat lekat dengan konteks perpustakaan. Proses kegiatan yang dilakukan sangat banyak dan membutuhkan ketekunan dalam penanganannya.

Pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar *lestari*, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe- dan akhiran –an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci *lestari* ditambah awalan pe- dan akhiran –an, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya.

Sedangkan kebudayaan menurut Koentjaraningrat diartikan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu.<sup>27</sup> Banyak berbagai definisi dari kebudayaan, namun terlepas dari itu semua kebudayaan pada hekekatnya mempunyai jiwa yang akan terus hidup, karena kebudayaan terus mengalir pada diri manusia dalam kehidupannya. Kebudayaan akan terus tercipta, dari tempat ketempat, dari individu ke individu dan dari masa ke masa.

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan

---

<sup>27</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 146.

nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.<sup>28</sup>

Pemahaman diatas memiliki kesinambungan dengan kegiatan pelestarian budaya di perpustakaan. Koleksi budaya yang ada diperpustakaan haruslah diperlakukan sama atau bahkan diperlakukan khusus dibandingkan dengan bahan pustaka atau koleksi lain yang ada diperpustakaan karena nilainya yang sangat tinggi. Pelestarian budaya seperti ini adalah mengusahakan agar budaya tidak mengalami kerusakan baik fisik maupun informasi yang dikandung atau bahkan hilang.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Gaya hidup masyarakat saat ini dipengaruhi oleh berbagai budaya dariluar. Berbagai kegiatan dilakukan oleh banyak pihak untuk tetap melestarikan budaya tradisional wilayah masing-masing. Kegiatan-kegiatan pelestarian kebudayaan sering dilaksanakan untuk mempertahankan nilai budaya baik dalam bentuk terjun langsung kedalam kebudayaan atau bahkan membuat pusat informasi tentang kebudayaan. Perpustakaan sebagai media penyedia berbagai bentuk informasi baik tercetak maupun non cetak dijadikan salah satu pusat informasi tentang kebudayaan tersebut.

Kegiatan kemitraan/kerjasama sendiri dilakukan karena kemitraan adalah kegiatan yang dianggap sebagai sebuah cara agar mendapatkan keinginan lebih mudah. Kemitraan ini juga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan kerjasama

---

<sup>28</sup>Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 114.

yang mana dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 42 ayat (1) kerjasama yang dilakukan oleh perpustakaan adalah kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka

Dengan diadakannya kegiatan kemitraan dalam upaya melestarikan koleksi budaya oleh pengelola perpustakaan di lingkungan sekolah bersama guru maka dapat meningkatkan layanan perpustakaan serta meningkatkan pemanfaatan oleh siswa dan pengetahuan siswa terhadap budaya semakin meningkat, sehingga pelestarian koleksi budaya dapat terlaksana dengan baik.

#### **Bagan Kerangka Berpikir**

